

DINAMIKA KEKUASAAN PADA MASA ABBASIYAH

Budi Setiawan, Erdian, Tiar Anwar Bachtiar

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam PERSIS Garut
Buset908@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 21-06-26

Disetujui: 09-07-26

Kata Kunci:

Dinasti Abbasiyah,
Dinamika kekuasaan
Politik, Kejayaan
Peradaban,
Kemunduran
Abbasiyah.

Abstract: *This study examines the dynamics of power during the Abbasid Dynasty, covering its historical background, political development, governmental and administrative systems, the peak of Islamic civilization, and the factors contributing to its decline. This research employs a qualitative method with a library research approach by analyzing various sources of Islamic historical literature. The findings indicate that the Abbasid Dynasty successfully led Islamic civilization to its golden age, particularly in politics, science, economy, arts, and culture. This success was supported by a well-structured administrative system, openness to non-Arab elements, the development of bureaucratic institutions such as *wizārah* and *diwān*, and the caliphs' support for scientific advancement through institutions like Bayt al-Hikmah. However, this glory did not last permanently. The decline of the Abbasid Dynasty was influenced by internal factors, including weak caliphal leadership, Turkish military dominance, sectarian conflicts, the emergence of smaller dynasties, and economic deterioration. Meanwhile, external factors such as the Crusades and the Mongol invasion became the main triggers for the dynasty's final collapse in 1258 CE. Therefore, this study emphasizes that internal political dynamics played a dominant role in shaping both the rise and decline of the Abbasid Dynasty.*

Abstrak: Penelitian ini membahas dinamika kekuasaan pada masa Dinasti Abbasiyah, mulai dari latar belakang berdirinya, perkembangan kekuasaan, sistem politik dan administrasi pemerintahan, puncak kejayaan peradaban Islam, hingga faktor-faktor kemundurannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap berbagai literatur sejarah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinasti Abbasiyah berhasil membawa peradaban Islam mencapai masa keemasan, terutama dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, dan budaya. Keberhasilan tersebut didukung oleh sistem administrasi yang terstruktur, keterbukaan terhadap unsur non-Arab, perkembangan lembaga birokrasi seperti *wizārah* dan *diwān*, serta dukungan para khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui institusi seperti Bayt al-Hikmah. Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan selamanya. Kemunduran Abbasiyah dipengaruhi oleh faktor internal berupa lemahnya kepemimpinan khalifah, dominasi militer Turki, konflik sektarian, munculnya dinasti-dinasti kecil, dan kemerosotan ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal seperti Perang Salib dan invasi bangsa Mongol menjadi pemicu utama keruntuhan akhir Dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 M. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika internal kekuasaan memiliki peran dominan dalam menentukan kejayaan sekaligus kemunduran Dinasti Abbasiyah.

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan, sehingga journal yang berjudul *Dinamika Kekuasaan pada Masa Abbasiyah* dapat diselesaikan tepat waktu, dan solawat serta salam tak lupa para penulis kirimkan kepada sang Rasul akhir zaman Muhammad Saw, karna berkat beliaulah kita semua dapat merasakan agama yang penuh dengan cahaya, yakni Islam.

Sejarah kemunculan, perkembangan, hingga hancurnya sebuah dinasti dalam sejarah Islam senantiasa menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Salah satu dinasti yang paling

berpengaruh adalah Dinasti Abbasiyah, yang merupakan fase kelanjutan atau pengganti dari Daulah Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan dari al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW (Hakiki, 2012).

Berbeda dengan Daulah Umayyah yang cenderung bersifat Arab-sentris, Dinasti Abbasiyah menerapkan distribusi kekuasaan yang sangat luas dengan merangkul masyarakat non-Arab (Mawali), terutama bangsa Persia dan Turki. Kebijakan ini membawa Islam mencapai puncak keemasannya (Hakiki, 2012), di mana khazanah keilmuan berkembang pesat dan menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban dunia, termasuk Eropa saat ini. Namun, sangat disayangkan bahwa dinasti yang mampu bertahan selama sekitar lima abad ini akhirnya harus mengalami keruntuhan. Meskipun serangan bangsa Mongol sering dianggap sebagai penyebab utama, terdapat indikasi kuat bahwa faktor internal dalam dinamika politik dan kekuasaan memiliki peran yang lebih dominan dalam menghancurkan eksistensi dinasti ini dibandingkan faktor eksternal.

Dinamika internal ini salah satunya dipicu oleh pergeseran struktur kekuasaan yang awalnya bersifat inklusif namun kemudian terjebak dalam ****persaingan antarbangsa**** yang tajam. Meskipun keterlibatan bangsa Persia dan Turki pada awalnya memberikan kontribusi besar bagi kemajuan administrasi dan militer, dominasi mereka yang terlalu kuat terutama militer bangsa Turki pada akhirnya membuat posisi para khalifah melemah hingga hanya menjadi simbol kekuasaan tanpa otoritas nyata. Perebutan pengaruh, intrik politik, hingga aksi pembunuhan di lingkungan istana menjadi pemandangan yang lazim, yang secara perlahan merusak stabilitas pemerintahan dari dalam pusat kekuasaan itu sendiri.

Kondisi politik yang tidak stabil tersebut diperburuk oleh kemerosotan ekonomi dan konflik keagamaan yang sistematis. Gaya hidup mewah para pejabat serta praktik korupsi menyebabkan kas negara (bait al-mal) terkuras (Hakiki, 2012), sementara pendapatan menurun drastis akibat banyaknya wilayah yang memisahkan diri dan tidak lagi membayar pajak. Di sisi lain, munculnya fanatisme mazhab dan aliran pemikiran yang saling berbenturan menciptakan disintegrasi sosial yang luas di tengah masyarakat. Perpaduan antara krisis politik, ekonomi, dan sosial inilah yang sebenarnya telah melumpuhkan kekuatan Abbasiyah, sehingga serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M hanyalah menjadi pukulan terakhir bagi sebuah kekuasaan yang memang sudah rapuh dari dalam (Hakiki, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi fenomena politik dan sejarah. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap literatur yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan pada masa Dinasti Abbasiyah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber literer. Sumber data mencakup jurnal ilmiah, buku teks sejarah peradaban Islam, yang memberikan informasi kronologis mengenai fase berdiri, puncak kejayaan, hingga faktor-faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memverifikasi argumen bahwa dinamika

internal memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan arah kekuasaan dibandingkan faktor eksternal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan Buatan: Perkembangan dan Relevansi Kontemporer

Sejarah Singkat Berdirinya Dinasti Abbasiyah

Latar belakang berdirinya Dinasti Abbasiyyah dikaitkan dengan ketidakpuasan berbagai bagian masyarakat Islam terhadap kebijakan Dinasti Umayyah, terutama dari kalangan mawali (Muslim non-Arab), kelompok Syiah, dan orang-orang yang tinggal di wilayah timur seperti Khurasan. Kebijakan diskriminatif yang lebih mengutamakan bangsa Arab pada akhir pemerintahan Umayyah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mawali, yang telah memeluk Islam tetapi tidak mendapatkan hak politik dan sosial yang sama. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin tajam. Menurut Ummatin (2021). Selain itu, kekuasaan Umayyah yang diwariskan dari generasi ke generasi memicu kritik dari kelompok yang menginginkan kembalinya prinsip musyawarah, atau syura, dalam pemilihan pemimpin umat Islam. Perlawanan kelompok Syiah terhadap kekuasaan Umayyah, yang mereka anggap menyimpang dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, memperkuat sentimen ini.

Keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, memimpin gerakan Abbasiyyah, yang berhasil mengumpulkan kekuatan dari berbagai kelompok yang merasa terpinggirkan. Pergerakan ini mengarah pada Pertempuran Zab pada tahun 750 M, di mana Dinasti Umayyah dikalahkan oleh pasukan Abbasiyyah. Dengan keberhasilan ini, Dinasti Abbasiyyah muncul sebagai pengganti Dinasti Umayyah. Tidak seperti Umayyah, yang berpusat di Damaskus, Abbasiyyah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Pemindahan ini memiliki konsekuensi yang signifikan secara strategis secara politik dan ekonomi, serta mengubah budaya Islam menjadi lebih terbuka dan toleran. Bagdad kemudian berkembang menjadi pusat penting untuk politik, ekonomi, dan intelektual, bahkan dianggap sebagai pusat peradaban dunia pada saat itu (Habibullah, et al, 2024).

Kebijakan Abbasiyyah yang membuka akses bagi non-Arab untuk terlibat dalam pemerintahan, administrasi, dan kehidupan sosial kemasyarakatan membawa dampak besar bagi lahirnya era baru dalam dunia Islam. Di bawah Abbasiyyah, peradaban Islam mengalami perkembangan pesat, tidak hanya dalam aspek kekuasaan politik, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, dan filsafat (Jannah & Fahrurrozi 2023).

Dengan demikian, latar belakang berdirinya Dinasti Abbasiyyah bukan hanya sekadar pergantian dinasti politik, tetapi juga menjadi simbol lahirnya peradaban baru yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, budaya asing, dan tradisi intelektual. Hal ini menjadi dasar bagi berkembangnya Masa Keemasan Islam (Golden Age of Islam) yang berlangsung selama berabad-abad setelahnya (Wulandari, et al, 2025).

Perkembangan Kekuasaan pada Masa Abbasiyah dan Khalifah-khalifah dinasti abbasiyah

Dalam perkembangannya Daulah Abbasiyah dibagi menjadi lima periode yakni, Periode Pertama (750 M. 847 M), yang para khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Periode Kedua (847 M. 945 M.) disebut periode pengaruh Turki. Periode Ketiga (945 M.-1055 M.) pada masa ini daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwaihi. Periode Keempat (1055 M.-1194 M.) dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode Kelima (1194 M.-1258 M.) periode ini khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu, mereka merdeka berkuasa akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya.

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Sebenarnya zaman keemasan Bani Abbas telah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur serta pada masa Khalifah al-Mahdi (775-785 M), akan tetapi popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa khalifah Harun al-Rashid (786-809 M.) dan putranya al-Ma'mun (813-833 M.).

Kekayaan banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Disamping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya (Salsabila, 2021).

Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Khalifah-khalifah Bani Abbas secara terbuka memelopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya untuk kemudian diterjemahkan, diadaptasi dan diterapkan di Dunai Islam. Para ulama' muslim yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun non agama juga muncul pada masa ini. Perkembangan pesat peradaban juga didukung oleh kemajuan ekonomi imperium yang menjadi penghubung Dunia Timur dan Barat. Stabilitas politik yang relatif baik terutama pada masa Abbasiyah awal ini juga menjadi pemicu kemajuan peradaban Islam.

Periodisasi Kepemimpinan Daulah Abbasiyah

Perkembangan Fase Pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam lima periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Selama hampir enam abad para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah (Sulaiman, 2020).

Periode pertama

Periode ini mulai tahun 132 H atau 750 M sampai tahun 232 H atau 847 M. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke sembilan Abu Ja'far Al-Watsiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS XI 9

disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah sebagai berikut:

- a. Abu Abbas Daulah (132 H/750M-136 H/754 M)
- b. Abu Ja'far Al-Mansur (136 H//754 M-158 H/775 M)
- c. Muhammad Al-Mahdi (158 H/775 M-169 H/785 M)
- d. Musa Al-Hadi (169 H/785 M-170 H/786 M)
- e. Harun Ar-Rasyid (170 H/786 M-193 H/809 M)
- f. Abdullah Al-Amin (193 H/809 M-198 H/813 M)
- g. Abdullah Al-Makmun (198 H/813 M-218 H/833 M)
- h. Al Mu'tashim Billah (218 H//833 M-227 H/842 M)
- i. Abu Ja'far Al-Watsiq (227 H/842 M-232 H/847 M)

Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah Al-Watsiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakannya yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam.

Periode kedua

Periode ini berlangsung tahun 232H/847M-334H/945 M). Sejak khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Bagdad, dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua:

- a. Al-Mutawakil (232 H/847 M-247 H/861 M)
- b. Al-Muntshir (247 H/861 M-248 H/862 M)
- c. Al-Mustain (248 H/862 M-252 H/866 M)
- d. Al-Mu'taz (252 H/866 M-255 H/869 M)
- e. Al-Muhtadi (255 H/869 M-256 H/870 M)
- f. Al-Mu'tamid (256 H/870 M-279 H/892 M)
- g. Al-Mu'tadhid (279 H/892 M-289 H/902 M)
- h. Al-Muktafi (289 H/902 M-295 H/908 M)
- i. Al-Muqtadi (295 H/908 M-320 H/932 M)
- j. Al-Qohir (320 H/932 M-322 H/934 M)
- k. Ar-Rodhi (322 H/934 M-329 H/940 M)

l. Al-Muttaqi (329 H/940 M-333 H/944 M)

m. Al-Muktafi (333 H/944 M-334 H/946 M)

Pada periode ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki, mulai periode ini sampai periode ke-empat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama.

Periode ketiga

Daulah Abbasiyah periode ini dimulai tahun 334 H/945 M-447 H/1055 M. Sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Bagdad. Periode ini disebut juga Periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwaihiyah, Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga:

a. Al-Muktafi (333 H/944 M-334 H/946M)

b. Al-Muti (334 H/946 M-362 H/974M)

c. At-Tho'i (362 H/974 M-381-H/991M)

d. Al-Qodir (381 H/991 M-422 H/1031M)

Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwaihiyah. Pada masa itu, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khotib salat Jum'at banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwaihiyah.

Periode keempat

Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 447 H/1055 M- 590 H/1194 M. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Bagdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Saljuk. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat:

a. Al-Qoyyim (422 H/1031 M-467 H/1075M)

b. Al-Muqtadi (467 H/1075 M-487 H/1094M)

c. Al-Mustazhir (487 H/1094 M-512 H/1118M)

d. Al-Musytarsid (512 H/1118 M-529 H/1135M)

e. Al-Rasyid (529 H/1135 M-530 H/1136M)

f. Al-Mustafi (530 H/1136 M-555 H/1160M)

g. Al-Mustanjid (555 H/1160 M-566 H/1170 M)

h. Al-Mustadi (566 H/1170 M-575 H/1180M)

i. An-Nashir (575 H/1180 M-622 H/1124M)

Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk, Khawarizm Syah telah mengakhiri Daulah ini. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan, hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya, karena hanya meliputi wilayah Iraq dan sekitarnya.

Periode kelima

Periode ini di mulai tahun 590 H/1194 M-656 H/1258 M dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun, namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima:

- a. Az-Zahir (622 H/1224 M-623 H/1226M)
- b. Al-Mustanshir (623 H/1226 M-640 H/1242M)
- c. Al-Musta shim (640 H/1242 M-656 H/1258M)

Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 M. Kota Bagdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian, berakhirilah kekuasaan Daulah Abbasiyah.

Pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak selamanya berjalan mulus dan tanpa gejolak. Selama beberapa periode pemerintahan terjadi pasang surut yang menyebabkan pergantian khalifah dari beberapa bangsa yaitu Turki, Persia dan Saljuk. Kecakapan para khalifah sangat berperan penting dalam mewujudkan kejayaan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Khalifah juga sangat berperan penting dalam mengendalikan keamanan dan stabilitas perekonomian sehingga konflik-konflik internal relatif dapat diredam.

Melemahnya Daulah Abbasiyah juga disebabkan oleh faktor politik antar bangsa, yaitu berdirinya daulah-daulah lain disekitar wilayah Daulah Abbasiyah. Diantara daulah-daulah lain yang berdiri di sekitar Daulah Abbasiyah adalah Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Thulunyah, Daulah Ikhsyidiyah, Daulah Fathimiyah dan Daulah Ayyubiyah di Mesir.

Kejayaan Dinasti Abbasiyah dan Kegemilangan Peradaban Islam

Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi pada masa beberapa khalifah besar, yaitu Abū Ja‘far al-Manṣūr (136–158 H/754–775 M), al-Mahdī (158–169 H/775–785 M), Hārūn al-Rasyīd (170–193 H/786–809 M), al-Ma’mūn (198–218 H/813–833 M), al-Mu‘taṣim (218–227 H/833–842 M), al-Wāṭiq (227–232 H/842–847 M), dan al-Mutawakkil (232–247 H/847–861 M). Pada masa pemerintahan mereka, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, seni, dan arsitektur.

Gerakan pembangunan ilmu pengetahuan secara besar-besaran dirintis sejak masa al-Manṣūr. Setelah mendirikan kota Baghdad pada tahun 144 H/762 M sebagai ibu kota Abbasiyah, al-Manṣūr mengundang para ulama, cendekiawan, dan ahli dari berbagai wilayah untuk menetap di sana. Ia mendorong pembukuan berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, bahasa, dan sejarah. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada penerjemahan karya-karya asing, terutama dari tradisi Yunani, Persia, dan India. Meskipun proses penerjemahan sudah dimulai sejak masa Umayyah, gerakan besar-

besaran baru berkembang pesat pada era Abbasiyah, dengan pusat awalnya di Jundīshāpūr yang dikenal sebagai kota ilmu pengetahuan penting dalam dunia Islam.

Dalam bidang hukum Islam, al-Manṣūr pernah meminta Malik ibn Anas menjadikan *al-Muwatta'* sebagai satu-satunya rujukan hukum negara. Namun, Imam Mālik menolak usulan tersebut karena menurutnya para ulama memiliki kebebasan berijtihad, dan perbedaan pendapat dalam fikih merupakan sesuatu yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam.

Pada masa ini, ilmu kedokteran juga berkembang pesat. Ketika al-Manṣūr sakit, ia memanggil dokter dari Jundīshāpūr bernama Jirjīs bin Bukhtīshū' untuk mengobatinya. Sejak saat itu, keluarga Bukhtīshū' menjadi dokter istana Abbasiyah dan turut mendorong berkembangnya ilmu medis. Buku-buku kedokteran Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menjadi fondasi bagi kemajuan medis Islam. Dari tradisi inilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Al-Razi dan Ibn Sina yang karya-karyanya berpengaruh hingga berabad-abad kemudian.

Masa Hārūn al-Rasyīd dikenal sebagai periode kemakmuran politik dan ekonomi. Negara berada dalam kondisi stabil, keamanan terjaga, kekayaan melimpah, dan wilayah kekuasaan membentang dari Afrika Utara hingga India. Baghdad berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sistem transportasi yang baik dan jalur perdagangan laut yang aktif semakin memperkuat perekonomian. Kondisi ekonomi yang makmur ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Gerakan penerjemahan mencapai puncaknya pada masa al-Ma'mūn. Ia mengirim para penerjemah ke Konstantinopel dan wilayah Romawi untuk mengumpulkan manuskrip sains dan filsafat. Di Baghdad, ia mendirikan *Bayt al-Hikmah* (Baitul Hikmah), sebuah pusat intelektual yang berfungsi sebagai perpustakaan, lembaga penerjemahan, observatorium, dan pusat penelitian. Di tempat inilah banyak karya Yunani diterjemahkan, terutama oleh tokoh seperti Hunayn ibn Ishaq yang menerjemahkan karya-karya Galen dalam bidang kedokteran dan filsafat.

Pada masa al-Mutawakkil, gerakan penerjemahan tetap berlanjut. Tokoh seperti Thabit ibn Qurra menerjemahkan karya-karya besar Yunani dalam geometri dan astronomi, termasuk karya Apollonius of Perga dan Archimedes. Selain karya Yunani, teks-teks India juga diterjemahkan, seperti kitab astronomi *Siddhānta* yang diterjemahkan oleh Al-Fazari. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Abbasiyah terbuka terhadap berbagai tradisi keilmuan dunia.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Abbasiyah didukung oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kontak intelektual antara Islam dan Persia yang mewarisi tradisi ilmiah Yunani. Kedua, kecintaan para khalifah terhadap ilmu pengetahuan, terutama Hārūn al-Rasyīd dan al-Ma'mūn. Ketiga, peran keluarga Barmak yang menjadi pendukung utama kegiatan intelektual di lingkungan istana. Keempat, kebijakan penghargaan besar kepada para penerjemah. Kelima, kondisi Baghdad sebagai kota kosmopolit yang dihuni berbagai etnis dan budaya, sehingga menciptakan interaksi intelektual yang dinamis (Shofwan, 2026).

Kegemilangan Abbasiyah tampak nyata dalam berbagai cabang ilmu. Dalam matematika, Al-Khwarizmi dikenal sebagai bapak aljabar karena kontribusinya dalam pengembangan aljabar dan sistem angka. Dalam astronomi, Al-Battani melakukan pengamatan bintang dan perhitungan astronomi dengan akurasi tinggi. Dalam kedokteran, rumah sakit di Baghdad menjadi pusat perawatan sekaligus pendidikan medis. Dalam filsafat dan teologi, tokoh seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali berhasil mengintegrasikan warisan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam.

Selain ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur juga berkembang pesat. Arsitektur Abbasiyah ditandai oleh bangunan monumental dengan kubah besar dan menara tinggi. Salah satu contoh terkenal adalah Great Mosque of Samarra yang memiliki desain megah dan inovatif. Seni kaligrafi berkembang sebagai bentuk ekspresi estetika tertinggi dalam peradaban Islam, digunakan untuk menghiasi masjid dan manuskrip Al-Qur'an. Seni mozaik juga berkembang dengan pola dekoratif yang rumit dan indah.

Dalam bidang budaya, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia Islam. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat sastra, musik, dan seni. Karya sastra terkenal seperti *One Thousand and One Nights (Seribu Satu Malam)* menjadi simbol kekayaan budaya Abbasiyah. Kehidupan masyarakat yang multikultural melahirkan suasana intelektual dan artistik yang sangat dinamis (Arsyad at al, 2024).

Dengan demikian, kegemilangan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya tercermin dalam kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga dalam kemajuan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya. Keberhasilan Abbasiyah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penelitian, inovasi, dan pertukaran budaya telah meninggalkan warisan besar bagi sejarah peradaban dunia.

Sistem Politik dan Administrasi Pemerintahan Dinasti Abbasiyah

Meskipun Dinasti Abbasiyah tetap mengusung sistem pemerintahan monarki seperti pendahulunya, dinasti ini menampilkan corak politik yang lebih terbuka terhadap pengaruh budaya dan intelektual. Abbasiyah memberikan ruang yang lebih luas bagi para ulama, cendekiawan, dan intelektual untuk berperan dalam pembangunan peradaban serta, dalam batas tertentu, memengaruhi arah kebijakan negara. Keberadaan *Bayt al-Hikmah* menjadi bukti nyata bagaimana kekuasaan Abbasiyah dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan politik, tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berdampak luas terhadap peradaban Islam secara global (Nurjuman, at al, 2025)

Setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah, pemerintahan Abbasiyah di bawah khalifah pertama, Abū al-‘Abbās al-Saffāḥ (750–754 M), mulai merumuskan pola politik baru yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu perubahan mendasar adalah dibukanya partisipasi politik bagi kelompok non-Arab, terutama kaum *mawālī* Persia, dalam struktur pemerintahan pusat. Kebijakan ini menandai perubahan orientasi politik Abbasiyah yang tidak lagi berpusat pada dominasi eksklusif bangsa Arab, melainkan mulai mengakomodasi unsur-unsur non-Arab yang memiliki kompetensi administratif dan intelektual.

Inovasi kelembagaan yang paling menonjol pada fase awal pemerintahan Abbasiyah adalah pembentukan lembaga *wizārah* (jabatan wazir), sebuah institusi yang tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Umayyah dan banyak terinspirasi oleh tradisi administrasi

Persia. Pengangkatan Abū Salamah al-Khallāl, seorang tokoh Persia, sebagai wazir pertama menunjukkan bahwa Abbasiyah secara sadar menjadikan kemampuan birokrasi non-Arab sebagai fondasi pengelolaan negara. Kehadiran wazir memungkinkan khalifah mendelegasikan urusan administratif sehari-hari kepada pejabat profesional, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih sistematis tanpa mengurangi otoritas simbolik khalifah. Fenomena ini menunjukkan adanya strategi *de-Arabisasi* dalam birokrasi, yakni otoritas politik tetap berada di tangan khalifah Arab, sementara administrasi negara banyak dijalankan oleh kelompok *mawālī* yang berpengalaman.

Reformasi politik yang paling strategis berlangsung pada masa Khalifah Abū Ja‘far al-Manṣūr (754–775 M), terutama melalui pemindahan ibu kota dari Kufah ke Baghdad. Secara politis, langkah ini bertujuan menjauh dari pusat gejolak politik di Kufah, khususnya pasca pemberontakan Rawandiyah, sekaligus menegaskan identitas baru Abbasiyah yang berbeda dari Umayyah. Pemindahan ibu kota ini bukan sekadar perubahan geografis, tetapi merupakan strategi besar untuk membangun pusat pemerintahan baru yang berfungsi sebagai jantung politik, administrasi, ekonomi, dan intelektual kekhalifahan.

Pada masa al-Manṣūr, struktur pemerintahan menjadi semakin terdiferensiasi melalui pembentukan jabatan-jabatan seperti *al-ḥājib* (protokol istana), *al-kātib* (sekretaris negara), *ṣāhib al-shurṭah* (kepala keamanan), serta penguatan fungsi *al-qāḍī* (hakim). Pembentukan jabatan-jabatan ini memperjelas pembagian kerja dalam pemerintahan. Keamanan khalifah dapat dikelola secara lebih sistematis, administrasi surat-menyurat menjadi lebih tertib, koordinasi antardaerah berjalan lebih efektif, stabilitas keamanan publik lebih terjaga, dan penyelesaian sengketa masyarakat memperoleh jalur hukum yang lebih pasti. Dengan demikian, administrasi Abbasiyah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan negara yang wilayahnya semakin luas.

Di bidang militer, al-Manṣūr membangun dewan militer berbasis koalisi dengan mempertahankan Tentara Khurasan yang dipimpin oleh Abū Muslim al-Khurāsānī sebagai kekuatan utama, namun tetap mempertahankan unsur tentara Arab dalam struktur militer. Pengaturan ini mencerminkan strategi keseimbangan antara kelompok pendukung revolusi yang banyak berasal dari Persia dengan elit Arab tradisional yang masih memiliki pengaruh kuat. Meskipun efektif dalam konsolidasi awal pemerintahan, pola ini juga menyimpan potensi konflik politik di masa berikutnya.

Pada masa Khalifah al-Mahdī (775–785 M), corak politik menjadi lebih akomodatif. Ia membuka komunikasi dengan berbagai kelompok sosial dan politik, termasuk kaum *ẓindīq* serta masyarakat Hijaz. Hubungan dengan Madinah, Makkah, dan Yaman diperkuat melalui pembangunan infrastruktur komunikasi dan renovasi Masjidil Haram. Kebijakan ini memperluas basis dukungan sosial Abbasiyah. Dalam komposisi elite pemerintahan, al-Mahdī berusaha menyeimbangkan legitimasi Arab dan profesionalisme Persia. Ia sempat mengangkat Abū ‘Ubaidillāh Mu‘āwiyah ibn Yasār dari kalangan Arab sebagai wazir, tetapi menjelang akhir kekuasaannya jabatan tersebut kembali dipegang oleh tokoh Persia, al-Fayḍ ibn Abī Ṣāliḥ. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian administratif Persia tetap dianggap paling efektif dalam menjalankan birokrasi negara.

Berbeda dengan pendahulunya, Khalifah al-Hādī (785–786 M) dikenal memiliki karakter politik yang lebih keras dan kurang kompromistis. Ia menghentikan pendekatan lunak terhadap kelompok *ẓindīq* dan mengambil kebijakan represif terhadap mereka. Selain itu, ia juga tidak melanjutkan upaya rekonsiliasi dengan keturunan ‘Alī ibn Abī Ṭālib. Meski demikian, dari segi struktur pemerintahan, al-Hādī tetap mempertahankan keluarga Barmak dalam posisi strategis sebagai wazir. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Abbasiyah terhadap jaringan administrasi Persia tetap kuat, terlepas dari perubahan gaya kepemimpinan khalifah.

Puncak konsolidasi politik dan administrasi pada periode pertama Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Hārūn al-Rasyīd (786–809 M). Hubungan personalnya dengan keluarga Barmak, khususnya Yaḥyā ibn Khālīd al-Barmakī, melahirkan kepercayaan politik yang tinggi. Setelah naik takhta, Hārūn menunjuk Yaḥyā sebagai wazir utama. Pada masa ini, prestise politik Abbasiyah mencapai puncaknya, tercermin dari hubungan diplomatik dengan Bizantium dan Kerajaan Frank. Hubungan baik dengan Charlemagne serta pengakuan politik dari kekuatan luar menunjukkan posisi Abbasiyah sebagai salah satu kekuatan besar dunia saat itu. Dengan demikian, kejayaan politik Hārūn al-Rasyīd merupakan hasil dari integrasi antara kekuatan militer, birokrasi profesional, dan diplomasi internasional yang efektif.

Perubahan besar terjadi pada masa Khalifah al-Mu‘taṣim (833–842 M) dan berlanjut pada masa al-Wāṭiq (842–847 M), ketika dominasi militer Turki semakin menguat. Al-Mu‘taṣim merekrut tentara Turki dalam jumlah besar dan menjadikan mereka sebagai kekuatan militer utama. Pemindahan ibu kota ke Samarra dilakukan sebagai respons atas ketegangan antara pasukan dan penduduk Baghdad. Namun, kebijakan ini memiliki dampak struktural jangka panjang karena militer Turki berkembang menjadi aktor politik dominan yang secara perlahan mengurangi pengaruh birokrasi sipil.

Pada fase berikutnya, pengaruh Turki dalam politik dan militer semakin kuat. Friksi antara elit Arab, teknokrat Persia, dan komandan Turki mulai melemahkan otoritas khalifah. Pada titik tertentu, militer Turki bahkan memiliki pengaruh besar dalam menentukan suksesi kekhalifahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi awal Abbasiyah yang bertumpu pada integrasi Persia dan koalisi Khurasan kemudian bertransformasi menjadi ketergantungan struktural pada kekuatan militer non-Arab.

Dalam kerangka administrasi, sistem pemerintahan Abbasiyah berkembang menjadi semakin fungsional dan terspesialisasi. Pada masa al-Manṣūr dikenal dua bentuk kementerian utama, yaitu *Wizārat al-Tanfīdh*, yang menjalankan kebijakan atas nama khalifah, dan *Wizārat al-Tafwīḍ*, yang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pemerintahan secara independen. Untuk mendukung tata kelola yang sistematis, dibentuk pula *Dimān al-Kitābah* (Sekretariat Negara) yang dipimpin oleh *Ra’īs al-Kuttāb*.

Di bawah sekretariat ini terdapat sejumlah *kātib* dengan tugas spesifik, antara lain *Kātib al-Rasā’il* (surat-menyurat resmi), *Kātib al-Kharāj* (pajak), *Kātib al-Jund* (administrasi militer), *Kātib al-Shurṭah* (keamanan), dan *Kātib al-Qaḍā’* (peradilan). Pembagian kerja ini memungkinkan administrasi negara berjalan secara lebih efisien dan profesional.

Pada masa al-Mahdī, diperkenalkan pula lembaga pengawasan baru seperti *Dīwān al-Zimām* (pengawasan keuangan negara), *Dīwān al-Tawqī'* (arsip dan dokumentasi resmi), dan *Dīwān al-Nazar fī al-Mazālim* (pengawasan peradilan atau semacam pengadilan banding). Kehadiran lembaga-lembaga ini memperkuat akuntabilitas birokrasi Abbasiyah.

Sistem administrasi mencapai tingkat spesialisasi yang lebih tinggi pada masa Hārūn al-Rasyīd. Melalui peran wazir Yaḥyā al-Barmakī, dibentuk berbagai departemen baru seperti *Dīwān al-Kharāj* (keuangan dan pajak), *Dīwān al-Mustaghallāt* (aset negara), *Dīwān al-Muṣādarah* (pengawasan politik), *Dīwān al-Aḥshām* (pengawasan aparatur), *Dīwān al-Riqā'* (petisi masyarakat), *Dīwān al-Sawād* (pendapatan pertanian), *Dīwān al-Nafaqāt* (belanja negara), serta *Dīwān al-Barīd* (komunikasi dan pos negara). Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan tingkat kematangan birokrasi Abbasiyah yang jauh melampaui sistem administrasi Umayyah.

Dengan demikian, perkembangan politik dan administrasi pada periode pertama Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa dinasti ini tidak sekadar melanjutkan warisan pemerintahan Umayyah, tetapi mengembangkannya menjadi sistem birokrasi yang lebih terstruktur, terspesialisasi, dan akuntabel. Kemajuan ini bertumpu pada beberapa strategi utama, yakni integrasi elit non-Arab, sentralisasi kekuasaan di Baghdad, profesionalisasi birokrasi melalui lembaga *wizārah* dan *dīwān*, serta restrukturisasi basis militer dari koalisi Khurasan–Arab menuju dominasi Turki pada fase akhir. Seluruh proses tersebut menjadi fondasi institusional yang memungkinkan Abbasiyah mempertahankan kejayaan peradabannya dalam jangka Panjang (Rahman dan Fadil, 2025).

Faktor-Faktor Kemunduran Dinasti 'Abbāsiyyah

Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Islam setelah Dinasti Umayyah yang berhasil membawa peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pada masa kejayaannya, Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban dunia Islam yang melahirkan banyak ilmuwan, ulama, filosof, dan cendekiawan besar. Akan tetapi, sebagaimana dinasti besar lainnya, Abbasiyah juga mengalami fase kemunduran hingga akhirnya runtuh. Kemunduran tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Para sejarawan umumnya mengklasifikasikan faktor-faktor kemunduran Dinasti Abbasiyah ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam tubuh pemerintahan Abbasiyah sendiri, dan faktor eksternal yang datang dari luar, seperti Perang Salib dan invasi bangsa Mongol.

Faktor Internal

Sebagaimana terlihat dalam periodisasi kekhalifahan Abbasiyah, faktor-faktor penyebab kemunduran tidak muncul secara mendadak. Benih-benih kemunduran sebenarnya sudah tampak sejak periode awal, tetapi belum berkembang karena para khalifah pada masa tersebut masih memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas, dapat dilihat bahwa ketika khalifah kuat, para wazir dan pejabat hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi negara. Sebaliknya, ketika khalifah lemah, para menteri, panglima militer, dan elit birokrasi mulai menguasai jalannya pemerintahan.

Lemahnya Kepemimpinan Para Khalifah

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran Dinasti Abbasiyah adalah lemahnya para khalifah pada fase disintegrasi. Khalifah-khalifah yang terpilih pada periode ini tidak memiliki kemampuan politik, militer, maupun administratif yang cukup untuk mengendalikan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Akibatnya, otoritas pusat di Baghdad semakin melemah dan banyak wilayah mulai memisahkan diri.

Kondisi ini menyebabkan pusat pemerintahan kehilangan perannya secara bertahap. Khalifah hanya menjadi simbol formal kekuasaan tanpa otoritas riil dalam mengatur negara. Perselisihan politik di internal istana pun semakin sering terjadi. Fenomena ini serupa dengan kemunduran Dinasti Umayyah di Suriah, ketika banyak penguasa diangkat dari kalangan yang tidak memiliki kompetensi memadai.

Setelah masa *al-Ma'mūn* (813–833 M) dan *al-Mu'tasim* (833–842 M), banyak khalifah Abbasiyah yang lebih sibuk dengan kemewahan istana daripada mengurus pemerintahan. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk hiburan, kemewahan, dan kehidupan aristokrat. Hal ini mempercepat melemahnya administrasi pemerintahan.

Dominasi Militer Turki dalam Pemerintahan

Perubahan besar menuju masa kemunduran dimulai pada masa Khalifah *al-Mu'tasim*. Ia merekrut tentara Turki dalam jumlah besar untuk memperkuat militer Abbasiyah. Tujuannya adalah mengurangi dominasi unsur Persia yang sebelumnya sangat kuat dalam pemerintahan. Untuk mendukung kebijakan ini, ia memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Samarra, sekitar 75 km dari Sungai Tigris, dan membangun kompleks militer khusus bagi pasukan Turki.

Pada awalnya, kebijakan ini memperkuat stabilitas pemerintahan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pasukan Turki justru menjadi kekuatan politik yang sangat dominan. Mereka memperoleh jabatan penting dalam pemerintahan dan menguasai militer secara penuh. Secara bertahap, tentara Arab dan Persia tersingkir dari struktur militer pusat.

Setelah masa *al-Mutawakkil* (847–861 M), dominasi militer Turki semakin besar. Mereka bahkan ikut menentukan siapa yang boleh menjadi khalifah. Khalifah tidak lagi memiliki kendali penuh atas militer. Dalam kondisi demikian, otoritas politik Abbasiyah secara praktis berada di tangan para panglima Turki.

Intervensi Bani Buwaih

Melemahnya kekuasaan khalifah memberi peluang bagi dinasti lain untuk menguasai Baghdad. Salah satu yang paling berpengaruh adalah *Bani Buwaih (al-Buwaihiyyūn)*, dinasti Persia bermazhab Syiah. Mereka berhasil menguasai pusat pemerintahan Abbasiyah dan menjadikan khalifah hanya sebagai simbol legitimasi keagamaan.

Khalifah Abbasiyah pada masa ini tidak mampu menahan pengaruh Bani Buwaih. Bahkan berbagai kebijakan politik sering dikendalikan oleh mereka. Dominasi Bani Buwaih juga memperuncing konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Dalam beberapa periode, tekanan terhadap masyarakat Sunni meningkat, sementara pengaruh Syiah semakin kuat di pusat pemerintahan. Kondisi ini memperlemah fondasi politik Abbasiyah. Kekuasaan khalifah yang seharusnya menjadi pusat pemersatu umat Islam justru berubah menjadi institusi simbolik tanpa kekuatan nyata.

Dominasi Turki Seljuk

Setelah masa Bani Buwaih, kekuasaan politik Baghdad beralih ke tangan Turki Seljuk. Tokoh penting Seljuk, Tughril Beg, datang ke Baghdad atas permintaan Khalifah *al-Qā'im* untuk menyingkirkan dominasi Bani Buwaih.

Tughril Beg berhasil merebut Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Bani Buwaih. Sebagai balasan, ia diberi gelar *Sultān wa al-Malik al-Sharq wa al-Gharb* (penguasa timur dan barat). Meski berhasil menstabilkan situasi politik, dominasi Seljuk tetap membuat khalifah Abbasiyah bergantung pada kekuatan militer eksternal.

Pada masa Seljuk, muncul tokoh besar bernama Nizam al-Mulk yang diangkat sebagai wazir. Ia berhasil memperkuat birokrasi dan pendidikan Islam melalui pendirian Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini menjadi pusat penyebaran teologi Asy'ariyah dan fikih Syafi'i. Bahkan Al-Ghazali pernah mengajar di sana. Namun stabilitas ini tidak bertahan lama. Nizam al-Mulk dibunuh oleh kelompok pengikut Hasan-i Sabbah. Peristiwa ini kembali mengguncang stabilitas Abbasiyah.

Munculnya Dinasti-Dinasti Kecil

Wilayah Abbasiyah yang sangat luas menjadi salah satu faktor kelemahan tersendiri. Luas wilayah yang membentang dari Asia Tengah hingga Afrika Utara sulit dikendalikan, terutama ketika kekuatan pusat melemah.

Akibatnya, banyak wilayah memerdekakan diri dan membentuk dinasti lokal. Di antaranya adalah *Tābirīyyah* di Khurasan, *Ṣaffāriyyah* di Persia, *Idrīsīyyah* di Maroko, *Umayyāh* di Spanyol, dan *Faṭīmiyyah* di Mesir. Walaupun beberapa wilayah masih mengakui Abbasiyah secara simbolis, secara administratif dan politik mereka berdiri sendiri. Hal ini membuat kekuasaan efektif khalifah semakin menyempit.

Kemerosotan Ekonomi

Pada masa awal, Dinasti Abbasiyah memiliki ekonomi yang sangat kuat. Sektor pertanian, perdagangan, industri, dan perpajakan berkembang pesat. *Bayt al-Māl* dipenuhi pemasukan dari berbagai wilayah.

Namun, ketika wilayah-wilayah mulai melepaskan diri, pemasukan pajak menurun drastis. Di sisi lain, pengeluaran negara justru meningkat akibat biaya militer yang besar, gaya hidup mewah istana, dan maraknya korupsi di kalangan pejabat. Melemahnya ekonomi berdampak langsung terhadap stabilitas politik. Pemerintah pusat tidak lagi mampu membiayai militer secara optimal maupun mempertahankan loyalitas daerah-daerah kekuasaan.

Konflik Keagamaan dan Fanatisme Mazhab

Faktor internal lain yang mempercepat kemunduran Abbasiyah adalah konflik mazhab dan fanatisme keagamaan. Persaingan antara Sunni dan Syiah sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Konflik sektarian ini tampak jelas ketika *Bani Buwaih* yang bermazhab Syiah menguasai Baghdad. Ketegangan semakin meningkat pada masa khalifah terakhir, *al-Musta'ṣim* (1242–1258 M), yang berselisih dengan wazirnya, Ibn al-ʿAlqamī.

Selain konflik Sunni–Syiah, muncul pula gerakan *ẓindīq* yang menyebarkan ajaran seperti Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroastrianisme. Gerakan ini dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas ideologis kekhalifahan (Sundari at al. 2024).

Faktor Eksternal

Selain faktor internal, kemunduran Abbasiyah juga disebabkan oleh tekanan dari luar. Dua faktor eksternal utama adalah Perang Salib dan invasi Mongol.

Perang Salib

Perang Salib merupakan salah satu faktor eksternal yang melemahkan dunia Islam secara umum, termasuk Abbasiyah. Konflik ini berakar dari permusuhan panjang antara dunia Kristen Eropa dan dunia Islam.

Pada tahun 1095 M, Pope Urban II menyerukan perang suci untuk merebut Yerusalem (*Bayt al-Maqdis*) dari kekuasaan Islam. Seruan ini memicu gelombang ekspedisi militer besar dari Eropa menuju wilayah Muslim.

Dalam beberapa gelombang perang, pasukan Salib berhasil menguasai berbagai wilayah penting seperti Nicea, Edessa, Akka, Tripoli, Tyre, dan Bayt al-Maqdis. Meskipun Abbasiyah tidak menjadi target utama secara langsung, perang ini menguras energi politik dan militer dunia Islam.

Serangan Bangsa Mongol

Faktor eksternal yang paling menentukan runtuhnya Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari Asia Tengah dan dipersatukan oleh Genghis Khan.

Ekspansi Mongol terus berkembang hingga menguasai Khurasan, Persia, dan Asia Kecil. Puncaknya terjadi ketika Hulagu Khan mengirim ultimatum kepada Khalifah *al-Musta'şim* agar menyerah dan meruntuhkan benteng pertahanan Baghdad.

Khalifah mengabaikan ultimatum tersebut. Pada Januari 1258 M, pasukan Mongol mengepung Baghdad dan menghancurkan tembok kota. Setelah itu, Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Khalifah bersama para pejabat, fuqaha, dan elit pemerintahan ditangkap. Beberapa hari kemudian mereka dieksekusi. Kota Baghdad dihancurkan secara besar-besaran selama kurang lebih empat puluh hari. Istana, masjid, sekolah, dan perpustakaan dihancurkan. Ratusan ribu hingga jutaan penduduk terbunuh. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad (Fathiha,, 2021).

Periodisasi Kemunduran Dinasti Abbasiyah

Untuk memahami proses kemunduran Abbasiyah secara lebih sistematis, para sejarawan membaginya ke dalam lima periode.

Periode pertama (132–232 H / 750–847 M) merupakan masa pengaruh Persia pertama dan masa kejayaan Abbasiyah. Pada periode ini, kekhalifahan dipimpin oleh khalifah-khalifah besar seperti *al-Saffāh*, *al-Manşūr*, *al-Mahdī*, *al-Hādī*, Harun al-Rashid, *al-Amīn*, *al-Ma'mūn*, *al-Mu'taşim*, dan *al-Wāthiq*. Masa ini dikenal sebagai puncak kejayaan politik dan intelektual Abbasiyah.

Periode kedua (232–334 H / 847–945 M) merupakan awal kemunduran, ditandai dengan dominasi militer Turki dan melemahnya otoritas khalifah.

Periode ketiga (334–447 H / 945–1055 M) adalah masa dominasi Bani Buwaih, ketika pengaruh Persia kembali menguat dan khalifah hanya menjadi simbol.

Periode keempat (447–590 H / 1055–1194 M) merupakan masa dominasi Turki Seljuk. Pada masa ini Abbasiyah memperoleh stabilitas tertentu, tetapi tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Seljuk.

Periode kelima (590–656 H / 1194–1258 M) merupakan masa khalifah relatif bebas dari dominasi dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di Baghdad. Periode ini berakhir dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada 656 H / 1258 M (Shofwan, 2026).

SIMPULAN

Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang berhasil membawa peradaban Islam mencapai masa keemasan dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Berdirinya dinasti ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah, kemudian berkembang menjadi kekhalifahan yang lebih terbuka terhadap unsur non-Arab, terutama Persia dan Turki. Pada

masa khalifah-khalifah besar seperti Abū Ja'far al-Manṣūr, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun, Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dengan menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia Islam dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan melalui lembaga seperti Bayt al-Hikmah.

Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan selamanya karena berbagai faktor internal dan eksternal. Lemahnya kepemimpinan khalifah, dominasi militer Turki, konflik mazhab, munculnya dinasti-dinasti kecil, serta kemerosotan ekonomi secara bertahap melemahkan kekuasaan Abbasiyah. Di sisi lain, tekanan eksternal seperti The Crusades dan serangan bangsa Mongol mempercepat keruntuhannya hingga akhirnya Baghdad jatuh pada tahun 1258 M. Dengan demikian, dinamika kekuasaan Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan persatuan internal merupakan faktor utama dalam menjaga kejayaan suatu peradaban.

DAFTAR REFERENSI

- Hakiki, Kiki Muhamad. "Mengkaji Ulang Sejarah Politik Kekuasaan Dinasti Abbasiyah." *Jurnal TAPIs* 8, no. 1 (Januari–Juni 2012): 114–134.
- Rahman, Khalil, dan Fadil SJ. "De-Arabisasi dan Transformasi Peradaban: Kajian Politik, Administrasi, Ekonomi, dan Hukum pada Dinasti Abbasiyah Periode Pertama." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2025).
- Nurjuman, Iman, Ulan Sri Anggraeni, Mochammad Irfan Fachrurozi, Ismi Hasyudi, Masripah, M. Tajudin Zuhri, dan Nenden Munawaroh. "Dinamika Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah: Suatu Kajian Historis-Filosofis." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).
- Arsyad, Mujahid Mallombasi, Muhammad Zain, dan Bahaking Rama. "Dinasti Abbasiyah: Biografi Khalifah, Kebijakan Politik, Pengaruh, dan Kegemilang Peradaban Islam." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (Desember 2024).
- Shofwan, Arif Muzayin. "Kejayaan dan Kemunduran Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Keislaman* 9, no. 1 (Maret 2026).
- Sundari, Ritonga, dan Nasution. "Kemunduran Dinasti Abbasiyah dan Dampak Invasi Mongol terhadap Peradaban Islam." *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (November 2024).
- Fathiha, Nuril. "Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)." *ISTORLA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 17, no. 1 (Maret 2021).
- Habibullah, J. A., D. Handayani, L. Anggita, dan A. Alimni. "Rekonstruksi Pendidikan Islam Masa Abbasiyyah sebagai Model Pembelajaran Abad 21." *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* (2024).
- Jannah, R., dan S. Fahrurrozi. "Perkembangan Ilmu Kaligrafi pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf* 1, no. 1 (2023).

- Wulandari, Riskiyanda, Nadia Febriyanti, Hermalisa, Ninda Audiska, Icha Fadillah Putri, Tria Desfika, dan Sirojul Fuadi. “Sejarah dan Peran Dinasti Abbasiyyah antara Tahun 750 hingga 1258 M dalam Peradaban Islam.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 4 (Agustus 2025).
- Salsabila, Rosanti. “Sejarah Dinasti Abbasiyyah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern.” *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (November 2021): 100–101.
- Sulaiman, Moh. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Cet. 1. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.